



KEDUDUKAN DAN URGENSI
LEMBAGA PENGAWAS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA
(STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN KOREA SELATAN)

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Disusun oleh:

ATTANIYA ALMUNA

NIM. 11000120120077

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2024



KEDUDUKAN DAN URGENSI
LEMBAGA PENGAWAS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA
(STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN KOREA SELATAN)

TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Disusun oleh:

ATTANIYA ALMUNA

NIM. 11000120120077

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN
KEDUDUKAN DAN URGENSI
LEMBAGA PENGAWAS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA
(STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN KOREA SELATAN)
TUGAS AKHIR-SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh:

ATTANIYA ALMUNA
NIM 1100120120077

Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Prof. Dr. Lita Tyesta ALW., S.H., M.Hum.

NIP. 196009261986032001

Pembimbing II



Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.

NIP 198905212014042001

HALAMAN PENGUJIAN
KEDUDUKAN DAN URGENSI
LEMBAGA PENGAWAS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI
DARI PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA
(STUDI PERBANDINGAN INDONESIA DAN KOREA SELATAN)

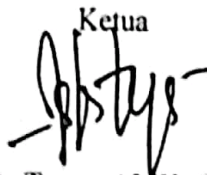
Dipersiapkan dan disusun oleh
Oleh:

ATTANIYA ALMUNA
NIM 1100120120077

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14 Juni 2024.....

Dewan Penguji

Ketua



Prof. Dr. Lita Tyesta AL.W., S.H., M.Hum.

NIP. 196009261986032001

Anggota Penguji I



Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H.
NIP 198905212014042001

Anggota Penguji II



Prof. Dr. Fifiana Wisnaeni, S.H., M.Hum.
NIP 196208011987032001

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.
NIP 196711191993032002

Mengetahui
Ketua Program Studi Sarjana Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H.
NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan dalam daftar pustaka.

Semarang, 22 Mei 2024



Autanya Almuna
110001201200177

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Yakinkan dengan Iman, Usahakan dengan Ilmu, Sampaikan sebagai Amal.”

Yakin Usaha Sampai.

Persembahan:

Penulisan hukum ini penulis persembahkan kepada:

1. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
2. Para Pembaca Sekalian
3. Bangsa dan Negara Indonesia

Semoga hasil dari penulisan hukum ini dapat bermanfaat dan dipergunakan secara baik sejalan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir dengan judul “Kedudukan Dan Urgensi Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Dari Perspektif Hukum Tata Negara (Studi Perbandingan Indonesia Dan Korea Selatan).” Tugas akhir ini dibuat untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan program sarjana di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Penulis tentu tidak dapat menyelesaikan tugas akhir tanpa bantuan dari beberapa pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta motivasi dalam proses penulisan tugas akhir ini, maka penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak berikut:

1. Prof. Dr. Suharnomo, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Diponegoro yang beberapa kali memberikan nasihat-nasihat untuk penulis dalam menjalani masa perkuliahan di Universitas Diponegoro.
2. Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah memberikan dukungan kepada penulis sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Undip.
3. Prof. Dr. Lita Tyesta ALW, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam setiap tahapan penyusunan tugas akhir ini.
4. Dr. Sekar Anggun Gading Pinilih, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam setiap tahapan penyusunan tugas akhir ini.

5. Orang tua penulis Bapak Anang Masrukin dan Ibu Sri Wahyuni yang telah memberikan dukungan tidak terhingga baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat bertahan hingga titik ini. Terima kasih telah sabar menghadapi penulis dalam proses mengerjakan tugas akhir ini dan selalu menjadi rumah untuk kembali di saat penulis merasa tidak baik.
6. Saudara penulis, Raisa Arum Azimah yang telah memberikan masukan-masukan sehingga penulis dapat mengerjakan tugas akhir dengan baik serta Asfi Maulina adik penulis yang sudah terlebih dahulu berpulang telah menginspirasi penulis untuk tetap bertahan dalam segala situasi sulit.
7. Abang/Kakak penulis selama masa perkuliahan, Fajar Sodik, Raihan Fudloli, Gusti Iqro Ibrahim, Abang/Kakak lainnya yang penulis tidak dapat menuliskan satu persatu.
8. Mentor sekaligus kakak saya, Angela Augusta yang paling spesial karena telah menyarankan judul tugas akhir bagi penulis dan telah menginspirasi banyak hal bagi penulis selama masa perkuliahan.
9. Teman-teman penulis selama masa perkuliahan, Tia Rizki Aulia, Nilam Helga, Zahra Jahrotan, Tiara Putri, Khoirunnisa, Uzma, Miranda, Dinda, Dinda Nabilah, dan kawan-kawan lainnya yang penulis tidak dapat menuliskan satu per satu telah kebersamai penulis selama masa perkuliahan, mewarnai hidup penulis, dan memberikan dukungan bagi penulis.
10. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum Undip yang telah memberikan banyak bantuan dan menjadi rumah bagi penulis selama masa

perkuliahan pun juga HMI Korkom Diponegoro dan HMI Cabang Semarang yang telah mendukung dan menginspirasi setiap langkah penulis.

11. Teman-teman dari organisasi yang penulis ikuti selama perkuliahan, Bidang Sosial Politik BEM Universitas Diponegoro serta Senat Mahasiswa Universitas Diponegoro yang telah menjadi wadah bagi penulis dalam berkembang.
12. Teman dan adik penulis selama masa perkuliahan, Astrid Andika Putri yang telah membantu dan mendukung penulis dalam situasi sulit.
13. Abang dari Universitas Semarang yang penulis bertemu saat Konfercab HMI Cabang Semarang ke-LV telah menginspirasi penulis untuk segera menyelesaikan tugas akhir.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini jauh dari kata sempurna, maka penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari seluruh pihak agar substansi dalam penulisan hukum dapat lebih berkembang. Penulis berharap penulisan tugas akhir ini memberikan manfaat bagi yang membutuhkan.

Semarang, 22 Mei 2024

Attaniya Almuna
110001201200177

ABSTRAK

Negara-negara di dunia termasuk Indonesia pun mengejar *adequacy decision* Uni Eropa untuk menjamin perlindungan data pribadi yang memadai di era serba digital ini. Salah satu syaratnya adalah adanya lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang independen. Korea Selatan menjadi salah satu negara yang mendapatkan *adequacy decision* tersebut. Permasalahan dalam penulisan ini adalah terkait dengan perbandingan pengaturan lembaga pengawas perlindungan data pribadi antara Indonesia dan Korea Selatan serta desain lembaga pengawas perlindungan data pribadi Indonesia agar memenuhi *adequacy decision*.

Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dan penulisan ini menggunakan analisis data secara kualitatif.

Hasil penelitian melalui perbandingan tiga peraturan yaitu PIPA, UU PDP, dan UU KIP menunjukkan bahwa terdapat berbagai perbedaan pengaturan, PIPA dan UU KIP menetapkan lembaga independen di bawah eksekutif sedangkan UU PDP dibentuk di bawah eksekutif dan diharapkan menjadi lembaga independen. PIPA mengatur tugas dan kewenangan lembaga dengan menekankan pada langkah-langkah perlindungan informasi pribadi sedangkan UU KIP dan UU PDP menekankan pada penegakan hukum.

UU PDP belum mengatur lebih lanjut terkait proses rekrutmen, syarat anggota, dan alasan pemberhentian anggota karena akan diatur dalam Perpres. Desain lembaga pengawas perlindungan data pribadi yang ideal di Indonesia memiliki bentuk tunggal dan independen dalam menjalankan tugas dan wewenangnya walaupun di bawah eksekutif.

Kata Kunci: Perlindungan Data Pribadi, Lembaga Negara Independen, Adequacy Decision

DAFTAR ISI

| | |
|--|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| HALAMAN PENGUJIAN | iii |
| PERNYATAAN..... | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| ABSTRAK | ix |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Penelitian..... | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 6 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1. Manfaat Teoritis | 7 |
| 2. Manfaat Praktis | 7 |
| E. Metode Penelitian..... | 8 |
| 1. Pendekatan Penelitian..... | 8 |
| 2. Spesifikasi Penelitian..... | 8 |
| 3. Jenis Data | 9 |
| 4. Metode Pengumpulan Data | 11 |
| 5. Analisis Data | 11 |
| F. Sistematika Penulisan | 12 |
| G. Orisinalitas Penelitian..... | 13 |

| | |
|---|------------|
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... | 17 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum | 17 |
| 1. Pengertian Negara Hukum..... | 17 |
| 2. Negara Hukum Indonesia..... | 21 |
| B. Tinjauan Umum Tentang Lembaga Negara | 26 |
| 1. Lembaga Negara..... | 26 |
| 2. Lembaga Negara Independen | 31 |
| C. Tinjauan Umum Tentang Hak Privasi sebagai Hak Asasi Manusia... 36 | |
| D. Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi..... | 43 |
| 1. Data Pribadi..... | 43 |
| 2. Perlindungan Data | 47 |
| BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 51 |
| A. Perbandingan Pengaturan Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Antara Indonesia Dengan Korea Selatan..... | 51 |
| B. Desain Lembaga Pengawas Perlindungan Data Pribadi Indonesia Untuk Memenuhi <i>Adequacy Decision</i> Berdasarkan Sistem Ketatanegaraan Indonesia | 95 |
| BAB IV PENUTUP | 117 |
| A. Kesimpulan | 117 |
| B. Saran | 118 |
| DAFTAR PUSTAKA | 121 |

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel 1. Perbandingan Penelitian..... | 13 |
| Tabel 2. Perbandingan Pengaturan..... | 72 |
| Tabel 3. Perbandingan Tugas | 75 |
| Tabel 4. Perbandingan Wewenang..... | 78 |
| Tabel 5. Perbandingan Pengaturan Rekrutmen, Syarat, dan Alasan Pemberhentian Anggota..... | 88 |